

**PENERAPAN POLITIK ETIS DI SURABAYA TAHUN 1911-1930****DHIMAS RANGGA GALIH**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [dedinurcahyo@mhs.unesa.ac.id](mailto:dedinurcahyo@mhs.unesa.ac.id)

**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat akibat dari ramainya aktivitas pelabuhan dan industri di Surabaya merupakan faktor penting dari diperhatikannya Surabaya pada masa politik etis, karena perkembangan Ekonomi tadi mampu menarik masyarakat dari golongan pribumi Cina Arab bahkan Eropa untuk mendekat dan menetap di Surabaya. Hal ini yang secara tidak langsung juga membuat pihak pemerintah Hindia-Belanda memperhatikan pula sektor pendidikan di Surabaya, karena Surabaya sudah menjadi salah satu kota penting layaknya Batavia sebagai pusat pemerintahan. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang juga semakin tinggi tiap tahunnya. Jadi dapat kita simpulkan faktor-faktor diatas adalah yang membuat pihak Kolonial Hindia-Belanda menjadikan Surabaya sebagai salah satu fokus utama penerapan daro Politik Etis di Hindia-Belanda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah sejarah yang dipakai untuk menyusun fakta, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan tentang masa lampau. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam metode sejarah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi Untuk memperoleh hasil maksimal dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelusuran sumber berupa staatsblad, serta kolonial Verslag tentang politik etis. Selain itu juga dibantu dengan buku-buku yang berkaitan dengan politik etis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Surabaya penerpan sistem Irigasi pada masa politik etis ini ialah saluran irigasi terbagi menjadi beberapa kategori, antara saluran primer, sekunder, tersier dan kwater. Untuk saluran tersier oleh desa atau beberapa desa yang berkepentingan, sedangkan saluran kwater dibuat oleh masing-masing pemilik sawah yang akan menggunakan saluran tersebut. Saluran primer adalah saluran pertama yang menghubungkan langsung dengan sungai atau sumber lain yang diambil airnya untuk pengairan. Dalam bidang pendidikan terdapat perkembangan seperti ELS yang mengalami peningkatan masa studi yang awalnya hanya 3 tahun menjadi 7 tahun. Selain itu dalam kurikulum ELS juga ditambah dan menekankan Bahasa Belanda, karena pelajaran akan pemahaman Bahasa Belanda dianggap sangat penting. Dan juga selain itu terdapat sekolah bersubsidi yang didirikan oleh perkumpulan missionaris gereja yaitu Broederschool Santo Yosef dan ELS Broederschool Santo Yosef. Pendidikan untuk etnis Cina pertama kali didirikan oleh perkumpulan Hok Tjiong Hak Kwan yang mendirikan sekolah bernama THHK (Tiong Hwa Hwee Kwan). Pada tahun 1909 pihak Kolonial mendirikan sekolah HCS untuk anak-anak Cina, dan kemudian pada tahun 1913 jumlah HCS bertambah setelah pihak Kolonial mendirikan da HCS lagi, pertama di Grisseescheweg (sekarang Jl. Gresik) jumlah siswa 200, dan yang kedua di Pasar Turi dengan jumlah siswa 209.

**Kata Kunci: Politik Etis , Kolonial, Surabaya**

### Abstract

The rapid economic development due to the hectic activity of ports and industries in Surabaya is an important factor in Surabaya's attention in the time of ethical politics, since the economic development was able to attract people from indigenous groups of Arabian Chinese and even Europeans to approach and settle in Surabaya. This indirectly also makes the Dutch East Indies government also pay attention to the education sector in Surabaya, because Surabaya has become one of the important cities like Batavia as the center of government. Especially to meet the needs of workers who are also higher each year. So we can conclude the above factors is what makes the Dutch East Indies Colonial make Surabaya as one of the main focus of the implementation of Ethical Policy in the Dutch East Indies

The method used in this research is historical history research used to compile facts, describe, and draw conclusions about the past. The activities done in the method of history is the selection of topics, heuristics, criticism, interpretation, and historiography To obtain the maximum results in this study, the researchers conducted a search source of *staatsblad*, as well as the colonial *Verslag* on ethical politics. It is also assisted by books related to ethical politics.

The result of the research shows that in Surabaya the system of Irrigation system in this period of ethical politics is irrigation channel divided into several categories, between primary, secondary, tertiary and kwater channel. For tertiary channels by villages or some interested villages, while the water channel is made by each owner of the rice field that will use the channel. The primary channel is the first channel that connects directly with the river or other sources water is taken for irrigation. In the field of education there are developments such as ELS which experienced an increase in study period which initially only 3 years to 7 years. In addition the ELS curriculum is also added and emphasized in Dutch, as the lesson of Dutch understanding is considered very important. Also, there is a subsidized school established by church missionary associations Broederschool Santo Yosef and ELS Broederschool Saint Yosef. Education for ethnic Chinese was first established by Hok Tjong Hak Kwan's association who founded a school called THHK (Tiong Hwa Hwee Kwan). In 1909 the Colonials established a HCS school for Chinese children, and then in 1913 the number of HCS increased after the Colonials established da HCS again, first at Grisseescheweg (now Jl Gresik) number 200 students, and the second at Pasar Turi with Number of students 209.

Keywords: Ethical Policy, Colonial, Surabaya

### PENDAHULUAN

Pada permulaan abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda kini memiliki tujuan baru, eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan "Politik Etis".<sup>1</sup>

Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Berbekal pengetahuan dasar dari isi novel Max Havelaar, sebagian

besar pegawai kolonial ini membawa pemikiran etis ke Hindia-Belanda

Selama jaman liberal (1870-1900), kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat penting dalam penentuan kebijakan penjajahan. Industri Belanda yang dikelola swasta mulai membuka cakrawala pengetahuan tentang penggalan potensi-potensi yang ada di Indonesia sebagai pasar yang potensial. Hal ini mendorong banyak pihak swasta dan pegawai swasta yang didominasi oleh bangsa asing merubah kehidupan standart mereka menjadi lebih bebas dan modern. Modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya daerah-daerah luar Jawa.

Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer (1857-1915). Seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880-97, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "Een eereschuld", "suatu utang kehormatan", di dalam jurnal Belanda de Gids. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada bangsa Indonesia semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Utang itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta. Serambi Ilmu Semesta. Hlm 329

rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Sampai saat meninggalnya, van Deventer adalah salah satu kampiun politik etis yang terkemuka, sebagai penasehat pemerintah, dan anggota parlemen. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan dengan demikian, politik etis secara resmi disahkan.

Politik etis merupakan sebuah politik balas budi, meskipun juga tak lepas dari intrik-intrik politik dan tujuan di dalamnya, hal yang awalnya balas budi ternyata tidak sejalan dengan apa yang di buat pada tujuan awal politik tersebut. Terbukti dengan masih adanya suatu keinginan dan kepentingan implisit dalam realisasinya, sebagai contoh adalah *emigrasi* (transmigrasi) yang di buat sebagai pemerataan penduduk Jawa dan Madura untuk di pindahkan ke daerah Sumatra Utara dan Selatan ternyata masih ada keinginan untuk mencari keuntungan besar dari kebijakan tersebut seperti di bukanya perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelolanya dan pengurangan jumlah kemiskinan di Jawa dan Madura, ini adalah sebagai contoh dari realisasi politik etis tersebut.

Namun meskipun ada hal sifatnya keuntungan namun tetap saja politik etis tersebut adalah fajar budi atau dalam bahasa Jerman adalah Aufklarung (pencerahan) bagi bangsa Indonesia dimana fajar budi itu muncul terlihat sinar-sinarnya dengan di buatnya sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi, meskipun sebagian besar adalah untuk kelas bangsawan saja namun untuk penduduk kelas bawah pun terdapat pendidik meskipun sistem dan fasilitasnya kelas II. Namun bukan masalah yang begitu pelik dalam hal ini karena dampak yang di timbulkan di kemudian hari adalah politik boomerang bagi pemerintahan Belanda, karena membuka pendidikan adalah mempersenjatai para penduduk pribumi yang lebih berbahaya dan lebih mematikan dari pistol ataupun meriam. Munculnya golongan terdidik dan terpelajar di kemudian hari menjadi ancaman bagi pemerintahan Belanda, lahirnya Budi Utomo, Sarikat Islam hingga pembentukan *Volkskraad* adalah respon dari stimulus yang diberikan oleh politik etis ini dengan memajukan pendidikan (Edukasi). Selain juga dua ranah lain yang di perbaharui yaitu pengairan dan infrastruktur (Irigasi) dan transmigrasi (Emigrasi).

Masalah Politik Etis di Indonesia menurut penulis sangat menarik untuk di bahas, karena dengan mulai masuknya politik etis, arah bangsa ini bergerak lebih cepat menuju kemerdekaan, oleh karena itu penulis ingin membahas tentang penerapan politik etis di Indonesia pada awalnya. Tapi karena keterbatasan akan sumber dan jarak tempat, penulis ingin berfokus melakukan penelitian di Surabaya pada tahun 1911-1930 karena pada masa perkembangan dan penerapan politik etis berjalan dengan baik.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan "*Penerapan Politik Etis di Surabaya Tahun 1911-1930*" belum pernah ada. Oleh sebab itu akan sangat menarik untuk

dilakukan penelitian dan mengkaji bagaimana penerapan Politik Etis di Surabaya.

## METODE

Dalam penulisan penelitian Penerapan Politik Etis di Surabaya tahun 1911-1930 akan menggunakan metode sejarah. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, sejarah juga dituntut memiliki seperangkat aturan dan prosedur kerja yang lebih dikenal dengan metode sejarah. Dalam sistem keilmuan metode sejarah merupakan seperangkat prosedur alat atau piranti yang digunakan sejarawan dalam meneliti dan menyusun sejarah.<sup>2</sup> Untuk mengungkap permasalahan yang akan di teliti penulis menggunakan metode penulisan sejarah melalui Heuristik, Kritik, Interpretasi, serta historiografi, adapun penjabaran dari prosedural metode tadi yakni :

### 1. Heuristik

Dalam menggunakan sumber yang dilakukan sejarawan adalah menentukan tema, topik, atau pokok persoalan tertentu yang akan di kerjakan, baru sejarawan kemudian melakukan pencarian, penemuan, ataupun pemilihan sumber yang dianggap relevan. Dari sumber-sumber tersebut sejarawan mendapatkan data atau keterangan tentang masa lampau dalam kerangka disiplin sejarah. Jadi objek kajian sejarah adalah data-data sejarah yang terekam oleh sumber sejarah<sup>3</sup>

Tahap ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian dalam penulisan tersebut. Penulis mendatangi tempat – tempat sebagai berikut ; (a). Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya di jalan Dukuh Kupang, (b). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di Jalan Menur, (c). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, (d). Perpustakaan Medayu Agung/Pak Wie di medayu Agung, (e). Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya di kampus Ketintang, (f). Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sumber primer yang didapat ; (a). BPK Jawa Timur. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie no 266 1901*. Berisi tentang pendidikan. (b). BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Inlandsch Onderwijs 1910-1913* laporan tentang pendidikan di keresidenan Surabaya

Sumber Skunder yang di dapat ; (a). Arsip Nasional Republik Indonesia penerbit sumber-sumber sejarah No. 10, *Memori Serah Terima Jabatan (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan) 1921 – 1930*. ANRI. Jakarta.1978. (b) Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial 1830-1830. Penulis Nasution.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### KONDISI UMUM SURABAYA

#### A. Sosial-Budaya

Kedatangan bangsa Eropa membentuk budaya baru yang asing dan sama sekali baru bagi penduduk Bumiputer. Berbagai budaya gaya hidup yang melingkup kegiatan hidup sehari-hari terpusat pada budaya pendatang

<sup>2</sup> Aminudin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10.

<sup>3</sup> *Id. at hlm 10*

Eropa. Selain dalam bentuk identitas-identitas material, juga memiliki dampak pembaratan atas mentalitas.<sup>4</sup>

Periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga terjadi transformasi struktur kehidupan masyarakat dengan masuknya pendatang Eropa. Struktur masyarakat agraris feodal tradisional mulai memudar dan mulai menuju masyarakat urban yang lebih modern.<sup>5</sup> Lebih lanjut proses perubahan tersebut terjadi akibat faktor-faktor *pertama*, proses perubahan akibat merosotnya peranan politik, ekonomi, dan sosial dari kerajaan-kerajaan tradisional yang kemudian secara berangsur digantikan oleh dominasi pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. *Kedua*, perubahan struktur masyarakat diakibatkan oleh terbentuknya stratifikasi dan segmentasi sosial baru bagi masyarakat pribumi dengan sistem pendidikan modern oleh pemerintah Kolonial Belanda. *Ketiga*, proses perubahan masyarakat diakibatkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian masyarakat akibat penetrasi ekonomi Barat. Proses ini dimulai sejak diberlakukannya *Culturstelsel* yang kemudian terus berlanjut pada periode berikutnya yakni liberalisasi ekonomi, dan lebih ditegaskan lagi pada fase pemberlakuan politik etis tahun 1900 sampai tahun 1930-an.<sup>6</sup>

Pada periode awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa, dampak budaya Barat masih sangat kecil. Baru setelah budaya Barat menjadi prestise dan dilihat sebagai derajat sosial yang tinggi, maka sistem dan pola budaya Barat mulai mempengaruhi masyarakat Indonesia. Proses ini dipercepat pada saat istana kerajaan bertindak sebagai perantara, sehingga anggota istana dan masyarakat kemudian mengikutinya.<sup>7</sup> Namun demikian pengaruh budaya ini hanya ada pada tingkat eksternalnya saja, tidak sampai pada elemen prinsip internal dari budaya. Budaya borjuasi berkembang sekedar pada nilai penampakan budaya luar yang kemudian dilihat sebagai gaya hidup, bukan sebagai semangat atau pandangan dan prinsip hidup<sup>8</sup>

Gejala modernisasi ini kemudian mulai tampak pada wilayah perkotaan. Hal ini terlihat dari mulai munculnya infrastruktur kota yang mau tak mau harus ada sebagai penyokong aktivitas dan penunjang kebutuhan hidup maupun tuntutan gaya hidup. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat Barat (Eropa) terletak di perkotaan sehingga diperlukan pendukung bagi berbagai aktivitas mereka. Awal abad XX kota-kota besar di Jawa sebagian besar menjalankan fungsinya sebagai pusat-pusat administratif dan komersial.<sup>9</sup> Kota-kota pelabuhan utama di Jawa menjadi pusat komersial karena memiliki fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yang dimaksud adalah sebagai pintu keluar hasil bumi untuk perdagangan internasional seperti gula, kopi, dan teh sekaligus pintu masuk barang-

barang dari luar pulau maupun luar negeri. Akibat aktivitas tersebut menyebabkan arus masuknya orang-orang Eropa ke Jawa sebagai motif baik untuk keperluan pemerintahan maupun urusan bisnis.

Surabaya sebagai salah satu kota pelabuhan sekaligus kota industri yang menjadi penunjang bagi kebutuhan industri primer di pedalaman Jawa bagian Timur. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai pusat aktivitas bisnis, industri, dan perdagangan. Surabaya menjadi kota yang lebih bagus dan lebih hidup bahkan dari pada Batavia. Didalam kota banyak gedung-gedung kantor dagang maupun pasar. Surabaya berkembang tidak hanya sebagai kota dagang tetapi juga sebagai kota industri dan kerajinan.<sup>10</sup>

Semakin beragamnya industri di Surabaya sebagai dampak perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduk Eropa yang ada di Surabaya. Orang-orang Eropa yang tinggal di Surabaya tentu saja memiliki kebiasaan yang berbeda dengan penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibangun penyedia kebutuhan orang-orang Eropa. Pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan selera mereka, barang-barang didatangkan dari Eropa, namun barang-barang tersebut terkena proteksi alami yang tinggi meskipun harga dari barang tersebut sangat murah (keadaan alam ikut membatasi seperti bahan-bahan makanan dan minuman yang cepat basi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang cepat rusak).<sup>11</sup> Bahkan untuk aktivitas hiburan dan ikatan ke-Eropa-an maka tiap waktu-waktu tertentu diadakan berbagai perkumpulan orang-orang Barat. Di Surabaya sendiri terdapat tempat perkumpulan disebut *Societiest Concordia* dan *Societiest De Club Simping*.<sup>12</sup> Selain itu juga banyak tempat hiburan serta tempat untuk memenuhi selera lidah dan perut orang-orang Eropa yakni restoran dan tempat-tempat Biliyard yang lebih dikenal sebagai Rumah Bola.

Untuk kehidupan sosial, Surabaya pada masa Kolonial dan awal masuknya politik etis ini penuh dengan diskriminasi, ditunjang sebagai daerah industri yang maju menyebabkan timbulnya kelas-kelas sosial di kalangan masyarakat. Pasalnya perbedaan gaya hidup yang dipraktikkan oleh golongan elite dan kelas bawah terlihat sangat nyata, beberapa faktor yang mencirikan gaya hidup golongan elite adalah glamoritas yang mahal serta *distingtif*. Golongan elite membuat lingkungan sosialnya sendiri dimana golongan bawah dilarang masuk. Salah satu contohnya ialah sebuah lembaga bernama *Societiest* yang merupakan lembaga beranggotakan kaum elite Eropa di Surabaya, mereka membedakan diri dari masyarakat bawah dengan pikiran yang hanya ingin bersenang-senang, terbebas dari beban, karena fokus mereka adalah materi duniawi, selain itu juga ada *Schouwburg* yaitu

<sup>4</sup> Denys Lombard, 2005, *Nusa Jawa Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*, Jakarta, Gramedia, Hlm 131

<sup>5</sup> D.H. Burger, 1983, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Bharata Karya Aksara, Hlm 110-117

<sup>6</sup> W. F. Werheim, 1999, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Tiara Waana, Hlm 180

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 189

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 190

<sup>9</sup> Ibid, Hlm 193

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 201

<sup>12</sup> Ibid

gedung kesenian atau rumah komedi yang biasa digunakan untuk memantaskan kesenian Eropa di kota Surabaya. Pengunjungnya juga didominasi oleh orang-orang elite Eropa. Meskipun pada awal pendiriannya sempat ada penolakan dari masyarakat setempat. Namun organisasi tersebut masih tetap terbentuk.<sup>13</sup>

## B. Potensi Ekonomi Surabaya

### 1. Industri

Penerapan sistem tanam paksa oleh gubernur jenderal Van Den Bosch mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi perkembangan industri di Surabaya. Pada masa ini pemerintah Kolonial Belanda mulai mengimpor peralatan mesin dari daratan Eropa untuk penggilingan gula yang memakai tenaga uap. Peralatan ini digunakan pada sebuah pabrik di dekat Probolinggo pada tahun 1836 dan kemudian pabrik di dekat Waru (Surabaya) pada tahun 1853. Pada tahun 1855 hampir 60% pabrik gula di keresidenan Surabaya sudah menggunakan mesin uap. Sampai tahun 1859 pabrik gula di Jawa merupakan salah satu industri yang paling banyak menggunakan mesin tenaga uap, yaitu 151 dari total 185 mesin uap yang dimiliki oleh swasta dan 19 oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Di samping jenis industri permesinan untuk pabrik gula, industri galangan kapal juga berkembang di Surabaya. Nama-nama pemilik galangan kapal seperti Curtis, Dormaar, Kramer, Essink, De Hoog, dan Zanthuys, membuka usaha di Surabaya sejak pertengahan abad ke-19. Perusahaan-perusahaan galangan kapal ini perlahan-lahan semakin berkembang sesuai dengan tuntutan para pemilik kapal uap.

Berbagai pabrik mesin dan perkapalan swasta yang lain yang didirikan selama periode ini di keresidenan Surabaya adalah bengkel milik Cores de Vries yang kemudian dialihkan kepada PT. Nederlandsch-indische industry di Rotterdam memiliki pabrik pengecoran logam, pembuatan katel, dan geladak pendorong bagi kapal dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Bengkel Deacon en O. dilengkapi dengan alat pemukul uap yang digabungkan dengan pengecoran logam dan pembuatan kapal. *De nederlandsch-indische stoomvaart-maatschappij* menyediakan sebuah pabrik untuk merawat dan memperbaiki kapal-kapal mesin dan katelnya sendiri. Galangan kapal ini milik firma *Trimp de Haas Schey En O.*, yang beroperasi hanya untuk pembuatan perahu-perahu kecil. Semua bengkel yang bergerak dalam bidang perkapalan ini berada di dermaga Kalimas. Bengkel-bengkel milik firma Young en Gill memiliki alat pemukul uap, sebuah pengecoran logam, pembuatan katel, dan saluran penghubung sejauh 8 meter. Pabrik milik firma Steenvelt en Co. Memiliki pengecoran logam, saluran uap, dan berbagai mesin untuk pengecoran besi. Pabrik milik L.G. Van Lakerveld en Co., C.F. Huijsdens (Kalisosok II), Ameijden van Duijn (juga Kalisosok II), dan A.Wijkman

(Kalimas), A.W. Rummert, juga turut memperluas perusahaannya dengan membuka industri pengecoran tembaga dan besi.<sup>15</sup> Selain industri perbengkelan, di Surabaya tumbuh juga industri-industri yang sifatnya menengah dan kecil, misalnya pabrik pengrajin kayu, dan pabrik penyulingan arak dan minuman keras.

### 2. Ekspor-Import

Surabaya setelah menjadi *gemeente* memiliki kedudukan yang sejajar dengan Batavia dan disebut sebagai tempat kedua terbesar di Jawa. Berdasarkan keramaian dan perkembangan perdagangannya, Surabaya bisa dianggap sebagai "ibu kota" Jawa.<sup>16</sup> Surabaya memiliki keuntungan alami dengan letaknya yang berada di tepi laut dan muara sungai yang besar dan dalam. Posisi ini memberi keuntungan dalam mempermudah akses lalu lintas menuju laut (pelabuhan). Pelabuhan Surabaya menjadi potensial sebagai jalur perdagangan ekspor-impor di wilayah timur karena posisi pelabuhan Surabaya secara geografis dilindungi oleh pulau Madura, sehingga aman dari topan.<sup>17</sup> Situasi ini juga didukung oleh keberadaan sungai Kalimas sebagai salah satu cabang sungai Brantas yang terbukti sejak jaman dahulu telah memberikan sumbangan penting bagi lalu lintas perdagangan dan interaksi ekonomi menuju jantung kota Surabaya.<sup>18</sup>

Pada tahun 1907 *Raad van Justitie* Surabaya mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz agar Surabaya diberi pelabuhan yang lebih baik. Sebagai kelanjutan dari permohonan dan perbaikan pelabuhan dari pemerintah Surabaya ini, maka pada tahun 1909 Prof. J. Kraus dan G.J. de Jong diundang oleh pemerintah kolonial untuk dimintai saran atau pendapatnya berkenaan dengan proyek pembangunan pelabuhan Surabaya. Setahun kemudian mereka menyerahkan laporan mengenai pembangunan pelabuhan Surabaya yang dimulai tahun 1910. Laporan pembangunan ini berisi mengenai segala sesuatu tentang bagaimana pentingnya pelabuhan sebagai pelabuhan utama di wilayah Jawa Timur untuk mengatasi kepadatan lalu lintas pelayaran di Kalimas. Berdasarkan laporan di atas juga disebutkan bahwa rencana pembangunan pelabuhan baru letaknya tak jauh dari pusat bisnis lama yaitu pelabuhan tradisional Kalimas.<sup>19</sup>

Rencana ini direalisasikan tahun 1910 karena dukungan dari pemerintah Kolonial dan pemerintah *gemeente* Surabaya. Proses pembangunan pelabuhan baru ini dengan jalan menguruk kolam-kolam ikan. Untuk menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota yang terletak 4-5 km dari pelabuhan, maka dibangun jalan kembar dengan lebar 48 meter.<sup>20</sup> Di kanan-kiri dari jalan kembar itu dibangun jalan tram listrik dengan lebar 12 m. Pembangunan pelabuhan Surabaya pada tahun 1910 ini tentu menunjang posisi perdagangan Surabaya.<sup>21</sup>

Kemajuan ekspor-impor Surabaya periode 1870-1930 dapat dibagi ke dalam dua periode waktu. Pembagian

<sup>13</sup> Denys Lombard, 2005. *Op, Cit*, Hlm 144

<sup>14</sup> Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Pusaka Intelektual, Hlm. 96

<sup>15</sup> Ibid. Hlm 99

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 78

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid. Hlm 80

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

ini didasarkan pada proses periode sebelum pembangunan pelabuhan Surabaya (1870-1910) dan periode pasca pembangunan pelabuhan sampai terjadinya resesi ekonomi (1911-1930).<sup>22</sup>

Pergantian sistem tanam paksa dengan sistem ekonomi liberal pada tahun 1870 telah membuka era baru dalam sejarah ekonomi Surabaya. Investor asing diundang untuk menanamkan modalnya di keresidenan Surabaya dan pemerintah Kolonial Belanda menawarkan suatu iklim bisnis yang lebih menarik kepada investor. Pada masa ini Surabaya khususnya dan Jawa pada umumnya semakin intensif melakukan perdagangan ekspor-impor. Besarnya perdagangan luar negeri sampai tahun 1900 dapat dikatakan meningkat, namun masih dalam tahap yang belum stabil.<sup>23</sup>

Komoditi gula masih menjadi primadona ekspor Surabaya sampai tahun 1910. Hampir 70% ekspor Surabaya pada periode ini adalah komoditi gula. Selain itu, kopi juga termasuk andalan ekspor Surabaya yang menguntungkan.<sup>24</sup>

Komposisi impor Surabaya sendiri pada periode 1870-1910 lebih diramaikan dengan barang modal untuk industri. Intensifnya penanaman tebu di keresidenan Surabaya oleh pihak swasta telah mendorong peningkatan kebutuhan gula sehingga kebutuhan untuk mengimpor mesin-mesin keperluan ini juga meningkat.

Pembangunan jalan kereta api juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya impor Surabaya. Hampir seluruh bahan baku material kereta api didatangkan dari luar negeri, yakni antara lain dari Belanda, Inggris, Jerman, dan Amerika.<sup>25</sup>

Periode kedua yakni periode pasca pembangunan pelabuhan Surabaya tahun 1911-1930, dimulai dari pembangunan pelabuhan Surabaya pada tahun 1910 yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi kelancaran aktivitas perdagangan. Pasang surut perdagangan ekspor-impor Surabaya pada periode 1911-1930 umumnya disebabkan oleh adanya gejolak harga dunia yang tidak stabil.

## LATAR BELAKANG DITERAPKANNYA POLITIK ETIS DI INDONESIA DAN SURABAYA

### A. Periode Awal Penerapan Politik Etis di Hindia-Belanda

Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Berbekal pengetahuan dasar dari isi

novel Max Havelaar, sebagian besar pegawai kolonial ini membawa pemikiran etis ke Hindia-Belanda

Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer (1857-1915). Seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880-97, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "Een eereschuld", "suatu utang kehormatan", di dalam jurnal Belanda de Gids. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada bangsa Indonesia semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Utang itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Sampai saat meninggalnya, van Deventer adalah salah satu kampiun politik etis yang terkemuka, sebagai penasehat pemerintah, dan anggota parlemen. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan dengan demikian, politik etis secara resmi disahkan.

Kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern pun terasa. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan bisnis mendukung keterlibatan yang semakin intensif dari pejuang dalam rangka ketentraman, keadilan, modernitas, dan kesejahteraan. Para pejuang kemanusiaan membenarkan apa yang oleh kalangan pengusaha diperkirakan akan menguntungkan itu, dan lahirlah politik etis.<sup>26</sup>

Pada tahun 1902, Alexander W.F. Idenburg menjadi menteri urusan daerah jajahan. Dengan memegang jabatan ini dan jabatan Gubernur Jenderal (1909-1916), Idenburg pun mempraktekkan pemikiran-pemikiran politik etis, lebih dari pada siapapun khususnya dalam bidang pendidikan. Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar kebijakan baru tersebut : pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan dana. Oleh karena itu, utang pemerintah kolonial yang mencapai 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Kolonial Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani utang lagi.

Snouck Huurgronje dan direktur pendidikan etis yang pertama (1900-5), J.H. Abendanon, mendukung pendekatan yang bersifat elite. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya bagi kaum elite Indonesia yang dipengaruhi barat, yang dapat mengambil alih banyak dari pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda. Dengan demikian, ini akan menciptakan suatu elite yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerja sama,

<sup>22</sup> Ibid. Hlm 81

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.82

<sup>26</sup> Ibid. Hlm 328

memperkecil anggaran belanja pemerintah, mengendalikan fanatisme islam, dan akhirnya menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah.

Idenburg dan gubernur jenderal van Heutsz (1904-9) mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya bagi golongan-golongan bawah. Pendidikan elitis diharapkan menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan bari Belanda –Indonesia, sedangkan pendekatan yang merakyat diharapkan memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejahteraan.<sup>27</sup>

Dibawah Abendanon, pendekatan elitis yang memberikan pendidikan bergaya Eropa dan memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diutamakan. Pada tahun 1900, tiga *hoofdensholen* sekolah para kepala, yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintahan dan di beri nama baru OSVIA (*Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren*, sekolah pelatihan untuk pejabat pribumi).<sup>28</sup> Masa pendidikannya berlangsung 5 tahun, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya dan terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa.

Calon-calon murid tak harus berasal dari kalangan elite bangsawan. Pada tahun 1900-2 sekolah dokter Jawa di *weltevreden* diganti menjadi STOVIA (*School tot opleiding van inlandhe artsen*, sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi). Mata pelajarannya juga diberikan dalam bahasa Belanda. Sejak tahun 1891, sekolah-sekolah rendah Eropa, yang merupakan prasyarat wajib untuk dapat memasuki OSVIA dan STOVIA, terbuka untuk orang-orang Indonesia, tetapi hanya orang-orang kayalah yang mampu membayar iuran sekolahnya. Abendanon memperluas kesempatan bagi orang-orang Indonesia yang bukan bangsawan untuk memasukinya dan menghapuskan iuran sekolah bagi orang tua yang penghasilannya di bawah 50 gulden perbulan.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan pembaruan-pembaruan tersebut, Abendanon menghadapi tantangan dari berbagai kalangan, termasuk para bupati yang lebih konservatif. Bagaimanapun juga, dia tetap gigih dan baru gagal ketika ingin memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita Jawa kalangan atas.<sup>30</sup>

Perbaikan-perbaikan pendidikan yang paling berarti adalah dalam sistem sekolah dasar dua kelas yang dibuka secara kecil-kecilan untuk orang-orang Indonesia sejak tahun 1892-3. Sekolah-sekolah kelas satu diperuntukkan bagi

golongan atas, sedangkan sekolah-sekolah kelas dua untuk rakyat jelata. Untuk mengurangi tekanan terhadap sekolah-sekolah rendah Eropa, satu-satunya lembaga dimana seorang Indonesia dapat belajar bahasa Belanda dengan cukup memadai dan melanjutkan sekolah ke OSVIA dan STOVIA, maka sekolah-sekolah kelas satu diubah pada tahun 1907. Sekolah-sekolah ini menerapkan masa pendidikan 5 tahun dan mengajarkan bahasa Belandam pada tahun keenam bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, pada tahun 1911 ditambah tahun ketujuh. Guru-guru berkebangsaan Belanda kini muncul disekolah-sekolah tersebut. Disekolah-sekolah pelatihan guru pribumi, sekolah pertama dibuka pada tahun 1852 dan kemudian disusul oleh yang lain-lain terutama setelah tahun 1870, bahasa Belanda diajarkan lagi sebagai mata pelajaran setelah dihapuskan selama sekitar 20 tahun, segera sesudah itu bahasa ini menjadi bahasa pengantar.<sup>31</sup>

Orang-orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda, tetapi masih ada masalah yang sifatnya struktural. Sekolah-sekolah kelas satu berada dalam sistem pendidikan pribumi, tidak ada kesempatan bagi orang Indonesia untuk melompat dari sistem ini kesistem Eropa yang paralel, yang merupakan satu-satunya lembaga untuk menuju pendidikan lanjutan. Oleh karenanya sekolah-sekolah kelas satu diubah menjadi sekolah-sekolah *Hollandsch-Inlandsche*, Belanda-Pribumi, (HIS) pada tahun 1914. Walaupun sekolah-sekolah tersebut masih tetap diperuntukkan bagi bangsa Indonesia golongan atas, namun kini secara resmi telah menjadi bagian dari sistem sekolah Eropa di Indonesia. Walaupun sekolah-sekolah *Hollandsch-Inlandche*, sekolah-sekolah *Hollandsh-chineesche*, Belanda-Cina, yang mulai dibuka pada tahun 1908, dan sekolah-sekolah rendah Eropa pada dasarnya berbeda dalam hal suku bangsa, tetapi semuanya kini mengarah ke pendidikan Eropa tingkat lanjutan dan kemudian kelapangan kerja birokrasi yang lebih tinggi. Bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar di semua sekolah tersebut.<sup>32</sup>

Ditingkat HIS pemisahan ras dalam pendidikan sudah tidak ada. Pada tahun 1914, sekolah-sekolah MULO (*Meer Uitgebreid lager onderwijs*, pendidikan rendah yang lebih diperpanjang, semacam SLTP) didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah menyelesaikan sekolah dasar mereka masing-masing.<sup>33</sup>

Pembangunan sekolah-sekolah kelas satu dan pengembangan-pengembangan lebih lanjut dalam pendidikan yang dibicarakan diatas sama

<sup>27</sup> Ibid. Hlm 339

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid. 340

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid 342

<sup>32</sup> Djumhur, I dan H Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu. Hlm 88

<sup>33</sup> M.C. Ricklefs. 2008. *Op.Cit. Hlm 343*

sekali tidak pernah ada kaitannya dengan rakyat Indonesia golongan bawah. Untuk mereka, sekolah-sekolah kelas dua disediakan. Memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan suatu masalah keuangan yang luar biasa, dan suatu cita-cita yang sama sekali tidak mendapatkan dukungan penuh, bahkan dari kalangan pendukung gagasan-gagasan etis sekalipun. Pada tahun 1918 diperkirakan bahwa akan menghabiskan biaya 417 juta *gulden* setahun guna mengurus sekolah-sekolah kelas dua bagi seluruh penduduk Indonesia, biaya ini jauh lebih besar dari pada seluruh pengeluaran pemerintah Kolonial Belanda. Rencana-rencana pertama untuk memperbanyak sekolah-sekolah kelas dua ditunda karena alasan-alasan keuangan ini.<sup>34</sup>

Pada tahun 1907, van Heutsz berhasil mendapatkan jawabannya. Sekolah-sekolah desa akan dibuka yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh penduduk desa sendiri, tetapi dengan dukungan pemerintah Kolonial Belanda sepenuhnya. Seperti halnya dengan banyak perbaikan etis lainnya, pemerintah Kolonial Belanda menetapkan apa yang baik untuk rakyat Indonesia dan sesudah itu memberitaukan kepada mereka berapa yang harus dibayar untuk perbaikan tersebut. Disekolah-sekolah tersebut akan ditetapkan masa pendidikan selama tiga tahun dan mata pelajarannya yang akan memberikan keterampilan-keterampilan dasar membaca, berhitung, dan keterampilan praktis, diajarkan dalam bahasa daerah. Uang sekolah dipungut. Ternyata desa-desa kurang menyambut gagasan akan sekolah desa tersebut, sehingga pihak Kolonial Belanda mulai menggunakan perintah secara halus, desakan lembut dari atas yang menjadi ciri pendekatan pihak Kolonial Belanda bagi langkah-langkah kesejahteraan desa. Pada tahun 1912 telah berdiri lebih dari 2500 sekolah desa. Pada tahun 1915 didirikan *Inlandsche Vervolgscholen*, sekolah lanjutan pribumi, untuk membawa para murid kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>35</sup>

#### **B. Faktor yang Melatar-Belakangi Surabaya Menjadi Salah Satu Kota dengan Fokus Politik Etis oleh Pemerintahan Hindia-Belanda**

Surabaya pada awal abad ke dua puluh merupakan kota dengan pelabuhan yang sangat maju bahkan melebihi pelabuhan-pelabuhan lainnya di Jawa, dengan majunya pelabuhan Surabaya maka migrasi tak dapat dihindarkan, banyak warga Eropa yang mulai menetap di Surabaya baik itu sebagai pekerja pemerintah

Kolonial maupun membuka perusahaan Industri di Surabaya, hal ini yang menyebabkan Surabaya banyak diperhatikan oleh pihak Kolonial Belanda selama masa politik Etis ini, karena banyaknya warga Eropa tentu mereka juga butuh sekolah-sekolah untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka, selain faktor tersebut juga majunya perindustrian di Surabaya menjadi salah satu faktor penting berkembangnya pendidikan, karena pemerintah juga memerlukan tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri-industri mereka maupun swasta, karena sektor industri juga di dominasi oleh orang-orang Eropa. Di lain sisi juga tentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pelabuhan yang menjadi pemicu gerak utama ekonomi di Surabaya.<sup>36</sup>

Aktifitas transportasi laut sudah dirasakan jauh sebelum kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sungai kalimas menjadi sentral lalu lintas jalan laut yang ramai dikunjungi perahu atau kapal layar dari berbagai pulau di Indonesia. Keramaian tersebut lebih diwarnai dengan perahu-perahu atau kapal layar kecil karena fungsi tempat berlabuh di sungai kalimas masih belum memadai untuk kapal-kapal berukuran besar.<sup>37</sup>

### **PENERAPAN POLITIK ETIS DI SURABAYA TAHUN 1910-1930**

#### **A. Irigasi**

##### **➤ Sejarah Irigasi di Indonesia**

Irigasi merupakan suatu daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman sesuai dengan fase pertumbuhannya (tepat jumlah dan waktunya) sehingga akan meningkatkan produktivitas dan hasil tanaman. Menurut Vaughn. E. Hansen.dkk. menyatakan bahwa irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman apabila terjadi kekeringan, menurunkan suhu dalam tanah, melunakkan lapisan keras tanah saat proses pengolahan tanah, membawa garam-garam dari permukaan tanah ke lapisan bawah sehingga konsentrasi garam di permukaan tanah menurun.<sup>38</sup>

Pengelolaan irigasi hampir tidak berubah meskipun sistem kerajaan Hindu-Budha telah berganti menjadi kerajaan Islam. Masuknya bangsa Eropa ke Pulau Jawa pada abad ke-16 telah merubah budaya dan teknologi tentang sumberdaya air termasuk irigasi. Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan pembangunan sistem irigasi teknis di Indonesia pada abad ke 19.<sup>39</sup> Pembangunan itu tak dapat dipisahkan

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 344

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Djumhur, I dan H Danasuparta. 1974. *Op.Cit. Hlm 154*

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Vaughn. E. Hansen.dkk.2004. *dasar-dasar dan Praktek Irigasi*. Jakarta : IKAPI.Hal 4

<sup>39</sup> Sigit Supadmo 2009. *Mengembalikan irigasi untuk Kepentingan rakyat*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Hal 7



dari pelaksanaan kebijakan Sistem Tanam Paksa untuk memacu ekspor komoditi perkebunan ke pasar Eropa.

Hingga seperempat pertama abad 20, pengembangan irigasi berkelanjutan merupakan bagian dari pengembangan kemandirian. Pengembangan aspek fisik irigasi (bangunan berikut jaringan irigasi) berada dalam kedudukan yang sama penting dengan aspek pengelolaan. Untuk dapat mengikuti pengembangan irigasi yang berkelanjutan secara benar diperlukan penekanan kembali keseluruhan makna arti irigasi sebagai ilmu teknologi dan juga dalam teknik pemakaian sehari-hari.<sup>40</sup>

Sejarah irigasi yang panjang di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi petani untuk menumbuhkan kelembagaan-kelembagaan pengelola air irigasi secara tradisional. Apabila sarana fisik sebuah jaringan irigasi merupakan perangkat kerasnya, maka lembaga-lembaga tersebut, baik yang formal maupun yang tidak formal merupakan perangkat lunak, yang mutlak diperlukan untuk mengelola air irigasi sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga yang telah dikembangkan oleh petani itu adalah merupakan semacam sumber daya nasional yang sangat berharga, yang patut dipelajari agar potensi air irigasi dan kemakmuran penghuni pedesaan dapat terus ditingkatkan

Perkembangan irigasi teknis di Indonesia lahir bersamaan dengan pelaksanaan tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk mengeruk keuntungan dan menambal hutang akibat Perang Diponegoro (1825-1830). Tebu merupakan tanaman budidaya yang paling memberikan keuntungan pada waktu itu, namun setelah wabah kelaparan pada 1840-1850-an, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya pada pengairan untuk padi. Para insinyur Belanda pada waktu itu mengagumi sistem irigasi tradisional yang telah berkembang di Jawa.

Puncak dari perkembangan tanam paksa ternyata hanya memperbaiki keuangan Negeri Belanda, karena selama itu Belanda dianggap sebagai perusahaan Belanda.<sup>41</sup> Di lihat dari segi irigasi tanam paksa memperoleh kemajuan di setiap daerah-daerah dalam pembangunan irigasi, sehingga rakyat Indonesia banyak yang menderita untuk memberikan hasil panen yang memuaskan. Akhirnya Belanda merasa malu dan tanam paksa mulai berangsur dihapuskan,

Menjamin ketersedianya air bagi tanaman perkebunan. Pembangunan irigasi di masa kolonial Belanda dilakukan dalam beberapa tahapan. Paling tidak terdapat tiga periode pentahapan, yaitu:

1. masa tahun 1830-1885, merupakan masa pembangunan fisik bangunan utama,

2. masa tahun 1885-1920, tahap pembangunan jaringan irigasi secara utuh, dan

3. periode 1920-1942 merupakan pelaksanaan operasional sistem secara mantap.

Tahapan ini perkembangan stabilitas administrasi Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa-masa awal pemerintah Kolonial baru mengembangkan fasilitas bangunan utama (*head work*) yang dilakukan masih secara empiris dan mengadopsi bangunan irigasi yang telah dibangun penduduk asli. Tak jarang timbul persoalan akibat tidak sempurnanya rancangan pembangunan. Tetapi semuanya itu selalu dapat diselesaikan. Melalui kajian berpuluh-tahun pemerintah kolonial kemudian mengembangkan irigasi modern di Indonesia dengan tata air yang lebih terkendali dan terukur. Ketika mengembangkan teknik irigasi modern di Indonesia, para insinyur Belanda harus mengubah konsep yang telah tertanam di benak mereka dari upaya mengendalikan air menuju upaya mengelola dan menyediakan air

Selain itu, sejalan dengan tuntutan terhadap peningkatan produksi tanaman perdagangan dan pertanian pada umumnya, pelaksanaan sistem tanam paksa bantak melakukan perbaikan atau pembuatan irigasi untuk meningkatkan hasil panen perkebunan Belanda. Selain itu, sistem tanam paksa telah mengenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Paling tidak ada tiga fase perkembangan yang perlu dicermati sebagai berikut.<sup>42</sup>

Pertama, fase pembangunan irigasi oleh masyarakat tani. Akumulasi pengalaman masyarakat tani terjadi dalam tempo yang lama mungkin ribuan tahun seperti yang dilaporkan oleh Van Zetten Vander Meer, 1979, mungkin berlangsung sejak 16 abad sebelum masehi, dimulai dengan pembangunan sawah tadah hujan, dan kemudian disusul dengan penemuan teknologi mengalihkan air dari sungai. Walaupun teknologi pengalihan aliran air tersebut bersifat sederhana yaitu pengambilan bebas (*free intake*), namun makna dari temuan tersebut adalah terjadinya perubahan sosial seperti pembagian tenaga kerja dan akumulasi kesejahteraan. Irigasi subak di Bali adalah salah satu contoh dari irigasi masyarakat yang diperkirakan berlangsung sejak penghujung milenium pertama.

Kedua, adalah fase koeksistensi antara irigasi masyarakat dan irigasi berbasis pemerintah. Sejak pertengahan abad 19 irigasi dalam skala besar dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Fase ini yang berlangsung lebih dari satu abad, (sejak 1948 – pertengahan da sawarsa tujuh puluhan) walaupun pemerintah kolonial Belanda membangun irigasi dalam

<sup>40</sup> Suprodjo Pusposutardjo, 2001. *Pengembangan Irigasi: Usaha Tani berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Hlm 5

<sup>41</sup> Abdullah Angoedi, 1984. *Sejarah Irigasi Di Indonesia*. Bandung :ICID. Hal 64

<sup>42</sup> Jurnal.; Effendi Pasandaran, *reformasi irigasi Dalam Kerangka Pengelolaan Sumberdaya alam : Analisa kebijakan Pertanian*. Voluleme 3 No 3, September 2005 : 217-135

skala besar pada sistem persawahan dan irigasi yang dirintis oleh masyarakat namun masyarakat tani tetap meneruskan pengembangan sistem irigasi mereka sendiri. Sistem irigasi yang dibangun masyarakat sering dianggap sebagai sistem irigasi liar karena bagunannya yang bersifat sementara yaitu mudah rusak bila diterjang banjir. Secara khusus sistem irigasi yang dianggap baik oleh pakar Belanda adalah irigasi subak di Bali dan sisten irigasi yang dibangun didaerah daerah Solo dan Yogya.

Fase ketiga adalah fase dominasi peranan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Pada fase ini investasi irigasi dilakukan secara besar besaran dengan tujuan mewujudkan tercapainya swasembada beras. Adanya teknologi revolusi hijau yang rensponsif terhadap air memerlukan upaya perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah ada dan perluasan sistem irigasi khususnya di luar Jawa. .

Munculnya Politik Etis itu sendiri pada dasarnya mengarah pada kepentingan kolonial, tetapi secara tidak langsung mendukung kemunculan kedua golongan tersebut. Wertheim, misalnya, mengungkapkan bahwa pemberlakuan Politik Etis dalam bidang irigasi ternyata memberi keuntungan bagi perkebunan tebu yang jumlahnya sebanyak populasi pertanian. Pelayanan kesehatan, sebagian berkaitan erat dengan kebutuhan dari berbagai perusahaan akan tenaga kerja yang secara fisik baik. Perjuangan melawan penyakit-penyakit berat, seperti penyakit pes dan kolera merupakan akibat langsung dari bisnis Barat. Sepanjang berkaitan dengan pengajaran dasar dari sekolah desa dan pendidikan model Barat, materi yang diberikan adalah sekitar pelatihan untuk personel administratif dalam badan-badan pemerintahan. Selanjutnya, dalam bidang industri terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan, sedangkan lalu lintas kereta api yang dilengkapi dengan bengkel-bengkel perakitan yang membuat mesin adalah untuk mendukung pabrik-pabrik gula

Era kolonoial ini, pembangunan keirigasian sudah mulai diintervensi oleh kepentingan pemerintah kolonial. Pembangunan dan pengelolaan irigasi yang sebelumnya banyak dikelola oleh masyarakat, sebagian telah diasimilasikan dengan pengelolaan melalui birokrasi pemerintah. Teknologi yang digunakan dan kelembagaan pengelola juga sudah dikombinasikan antara kemampuan masyarakat lokal dengan teknologi dan kelembagaan yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Akibatnya manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan kombinasi antara potensi kapital sosial yang ada di masyarakat dengan kemampuan birokrasi pemerintah Kolonial. Pada masa itulah mulai timbul adanya buruh tani yang mengerjakan lahan-lahan pertanian atau perkebunan milik pemerintah.

Demikianlah bahwa sistem pengelolaan irigasi pada masa kolonial Belanda dilakukan dengan hampirn kekuasaan untuk pembangunan ekomoni

negeri Belanda. Tetapi bagaimanapun juga pembangunan irigasi pada masa ini tetap memberi beberapa hal positif. Sistem pengelolaan irigasi pada masa kolonial Belanda telah memberikan dasar-dasar pengelolaan irigasi modern kepada kita.

Paska Kolonial di Indonesia, kegiatan irigasi di Indonesia tidak banyak di lakukan oleh pemerintah, karena hanya memprioritaskan pembangunan politik yang diwarnai terjadinya polarisasi kekuatan politik internasional pasca perang duniake-2, serta suasana konfrontasi dengan negara tetangga waktu itu.

#### ➤ Penerapan Irigasi di Surabaya

Pola penanaman tebu yang mirip dengan tanaman pertanian menyebabkan seringnya terjadi benturan kepentingan antara sektor pertanian dan perkebunan di beberapa wilayah salah satunya di Surabaya, kususnya masalah penggunaan air irigasi. Untuk mengatasi ini diperlukan suatu peraturan pembagian air, terutama pada saat musim kemarau.

Di Surabaya penerpan sistem Irigasi pada masa politik etis ini ialah saluran irigasi terbagi menjadi beberapa kategori, antara saluran primer, sekunder, tersier dan kwarter. Secara umum pembangunan saluran primer dan sekunder, sebagai saluran besar dibangun melalui kerja wajib dengan biaya ditanggung dengan pemerintah. Untuk saluran tersier oleh desa atau beberapa desa yang berkepentingan, sedangkan saluran kwarter dibuat oleh masing-masing pemilik sawah yang akan menggunakan saluran tersebut. Saluran primer adalah saluran pertama yang menghubungkan langsung dengan sungai atau sumber lain yang diambil airnya untuk pengairan.<sup>43</sup>

Dari pengairan primer air dialirkan ke dalam saluran-saluran sekunder melalui pintu-pintu pengatur yang menghubungkan kedua saluran tersebut. Areal sawah yang mendapatkan pengairan melewati saluran ini dinamakan daerah sekunder (daerah cabang). Setelah air mengalir melalui saluran sekunder, selanjutnya air disalurkan ke beberapa saluran tertier. Dari saluran tertier air dialirkan menuju area persawahan yang akan diairi yang dinamakan daerah tertier (daerah ranting). Pengambilan air untuk petak-petak sawah melewati anak saluran tertier dinamakan sebagai saluran kwarter. Tidak ada batas-batas khusus yang memisahkan antara daerah irigasi primer, sekunder dan tertier. Batas-batas sekunder biasanya berupa anak sungai, saluran pembuangan air, jalan kereta api atau jalan-jalan desa. Luas setiap daerah perairan tidak selalu sama. Ini ditentukan oleh keadaan dan bentuk dari daerah masing-masing.<sup>44</sup>

Untuk melaksanakan pembagian air diangkat petugas-petugas pengairan yang tergabung dalam jawatan pengairan. Mereka bertugas mengatur pembagian air irigasi sesuai dengan hak-hak dari berbagai kelompok yang berkepentingan. Termasuk dalam kewenangan mereka adalah memberikan pengairan kepada perkebunan-

<sup>43</sup> Ibid. Hlm 108

<sup>44</sup> Ibid. Hlm 111

perkebunan tebu, sedangkan kepada masyarakat terbatas pada pemberian air dalam daerah tertier. Supaya pembagian air dapat dilakukan dengan tepat sesuai waktu dan kebutuhan tanaman, diperlukan kerja sama dan Kamituwa untuk menentukan masa penanaman benih. Urusan pengairan sesudah memasuki daerah tertier dikerjakan dan dibebankan oleh kepala desa yang berkepentingan. Daerah rading inibiasanya terdiri dari beberapa desa. Sebelum lahirnya peraturan pembagian air, pembagian di daerah ranting dilakukan oleh semacam panitia yang terdiri dari wakil-wakil desa yang berada di daerah perairan tersebut di bawah pengawasan jawatan irigasi. Karena para wakil desa hanya mementingkan desa masing-masing sering menimbulkan persengketaan.<sup>45</sup>

Pada permulaan penerapan politik etis bagian Irigasi di Surabaya diberlakukan aturan "siang malam" untuk menyelesaikan masalah pembagian air. Aturan ini juga berlaku di diseluruh Jawa. Beberapa pasal dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa air pada siang hari digunakan untuk mengairi tanaman tebu, dan hanya pada malam hari digunakan untuk kepentingan tanaman palawija dan padi yang diusahakan oleh penduduk pribumi. Tanaman tebu mendapatkan air selama 10 jam mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Setelah itu air baru diberikan kepada petani. Peraturan demikian jelas merugikan petani, karena mereka yang terpaksa mencari air dalam jarak yang jauh harus mengalami kesulitan-kesulitan yang lain, misalnya mereka harus keluar tiap malam untuk mencari air. Kadang-kadang air belum sampai ke sawah pemilikinya telah dicuriorang lain. Selain itu sawah yang diairipada malam hari, pagi harinya kembali kering karena airnya menguap, sehingga penanaman sering tertunda.<sup>46</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, tanggal 17 dan 18 November 1903 para bupati mengadakan rapat dan meminta pada pemerintah agar diadakan pembagian air secara adil. Untuk itu dianggap perlu mengganti peraturan siang malam dengan sistem waduk. Pemberian air untuk tanaman tebu dan pertanian dapat dilaksanakan secara bersamaan pada waktu siang hari, tetapi untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan kebutuhan air baik terhadap tanaman tebu maupun tanaman penduduk masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, diterapkan cara pengaturan air yang dinilai lebih adil. Di beberapa daerah dilaksanakan sistem giliran harian (24 jam). Menurut aturan ini pembagian air dilakukan bergilir selama sehari semalam berturut-turut yang dimulai pada sore hari. Aturan ini ternyata dapat diterima oleh penduduk dan menggantikan sistem irigasi bergilir siang-malam sebelumnya dan juga diterapkan di Surabaya.<sup>47</sup>

## B. Pendidikan

### ➤ Sistem Pendidikan

Pada masa ini diterapkan kebijakan Konkordansi dalam dunia pendidikan, kebijakan yang memiliki prinsip bertujuan untuk menjaga sekolah-sekolah Hindia-Belanda mempunyai kurikulum dan standart yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Maksudnya ialah agar

mempermudah perpindahan murid-murid dari Hindia-Belanda ke sekolah-sekolah di negeri Belanda. Kebijakan ini berlandaskan pada banyaknya orang Belanda terutama yang kaya dan pegawai pemerintah kembali ke negeri Belanda untuk perlop atau pensiun, maka perlulah dimungkinkan perpindahan murid setiap waktu. Maka karena itu yang ideal ialah membuat sekolah Belanda di Hindia-Belanda sama dalam segala hal dengan yang di negeri Belanda. Inspektur ditugaskan untuk mengusahakan agar sekolah-sekolah mencapai mutu yang sama dengan sekolah yang ada di negeri Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut pada masa pemerintahan ini sekolah-sekolah Belanda baik itu sekolah rendah maupun menengah mengikuti kurikulum yang sama, memperkerjakan guru dengan kualifikasi yang sama seperti di negeri Belanda.

Walaupun terlihat hanya untuk kepentingan orang-orang Belanda, namun kebijakan ini diterapkan juga kepada sekolah-sekolah lain yang orientasinya bukan Belanda seperti HIS (*Hollandsch Inlandsche school*) maupun HCS (*Hollandsch Chineesche School*), HCS mempunyai kurikulum yang persis sama dengan ELS (*Europeesche Lagere School*). Walaupun tidak sampai batas yang sama, HIS juga tidak bebas dari pengaruh kebijakan ini, kurikulum HIS banyak berorientasi pada Belanda, standart akademis yang dicapai harus sama dengan ELS. Namun tranfer dari HIS ke ELS tidak mungkin dan lulusan HIS tidak dapat diterima di HBS (*Hoogere Buger School*).

Berkaitan dengan arah etis (*etische koors*) yang menjadi landasan idiil dari langkah-langkah dalam pendidikan di masa ini, maka pemerintah mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
- b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu maka corak sistem pendidikan dan persekolahan pada masa pemerintahan ini dapat ditempuh melalui dua jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama di harapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah berpendidikan.

Selain kebijakan diatas, Kolonial Hindia Belanda masih mempertahankan kebijakan lama yang dengan sengaja memelihara keadaan sosial yang terbagi menjadi golongan-golongan atau masyarakat yang hidup terkotak-kotak. Pembagian golongan sosial didasarkan pada ketrunan bangsa dan status.

- a. Pembagian penduduk
  1. Golongan Eropa
  2. Golongan yang disamakan dengan Eropa
  3. Golongan Bumiputera

<sup>45</sup> Ibid. Hlm 112

<sup>46</sup> Ibid. Hlm 117

<sup>47</sup> Ibid. Hlm 120

4. Golongan yang disamakan dengan Bumiputera
- b. Pembagian penduduk menurut keturunan atau status sosial.
  1. Golongan bangsawan (Aristokrat) dan pemimpin adat
  2. Pemimpin agama (Ulama)
  3. Rakyat biasa/jelata
 (kategori ini hanya terdapat pada golongan Bumiputera)

Sejalan dengan landasan idiil dan tujuan pendidikan pemerintah Hindia-Belanda pada masa ini yang berusaha mempertahankan sistem kolonialnya melalui Aristokrasi, maka sistem pendidikan dan persekolahan pun didasarkan pada penggolongan tersebut. Oleh karena itu terdapat jalur-jalur tertentu menurut golongan tersebut dalam mengikuti pendidikan di zaman Hindia-Belanda.

Sementara itu dalam hal penerapan kebijakan dari pusat ke bawah. Gubernur jendral dibantu oleh sekretariat umum mengurus segala korespondensi dengan kepala departemen pendidikan. Kepala departemen pendidikan hanya pelaksana perintah, dan Gubernur Jendral sebagai orang satu-satunya yang bertanggung jawab atas keseluruhan pemerintahan. Ketika suatu kebijakan turun, Gubernur Jendral menyampaikan keterangan dan kebijakan yang diperlukan kepada direktur departemen pendidikan. Kemudian direktur pendidikan akan menyampaikn dan menerbitkan keterangan terperinci tentang kebijakan tersebut kepada para inspektur atau suatu panitia khusus untuk menerbitkan kebijakan tersebut ke daerah-daerah.

Namun dalam hal pertimbangan pengambilan kebijakan sebelum terciptanya suatu kebijakan, sistemnya dari bawah keatas, sebelum mengambil kebijakan, Gubernur Jendral meminta keterangan yang diperlukan dari direktur departemen, kemudian direktur pendidikan akan meminta keterangan terperinci dari para inspektur atau panitia khusus guna memperoleh gambaran yang teliti dan nyata tentang suatu masalah. Kemudian setelah mendapat keterangan dari inspektur bawah, direktur pendidikan akan menyampaikan informasi tersebut kepada Gubernur Jendral beserta pandangan dan saran-sarannya. Gubernur Jendral akan mengirim semua keterangan kepada Dewan Hindia-Belanda untuk menerima advis dan kemudian menyerahkan masalah itu kepada Menteri Jajahan beserta pendapat dan saran-sarannya. Menteri akan mengambil keputusan akhir tentang apa yang akan dilakukan. Prosedur hirarkis ini harus diikuti dengan ketat. Direktur pendidikan tidak diizinkan untuk berhubungan langsung dengan Menteri melampaui Gubernur Jendral.

Oleh sebab pendidikan dikontrol secara sentral pada masa ini, guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik pendidikan. Segala soal mengenai sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru

ditentukan oleh pemerintah pusat dan turun ke daerah salah satunya di Surabaya melalui prosedur seperti diatas. Kemudian untuk kebijakan pendidikan mengenai pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah, pemerintah pusat lebih mengutamakan daerah-daerah dimana terdapat banyak orang Belanda dan juga memiliki arus ekonomi yang tinggi, bebrapa wilayah pembangunan pendidikannya lebih diutamakan karena menjadi pusat perekonomian pada masa ini seperti Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Beberapa kebijakan pusat untuk Surabaya sendiri pada masa ini ialah:

1. Memberi subsidi kepada sekolah missionaris gereja yang telah lama ada sebelum masa politik etis.
2. Membangun lagi satu sekolah ELS di daerah Sawahan (sekarang Jl. Weezen) pada tahun 1912
3. Mendirikan HIS pada tahun 1914
4. Mendirikan 2 lagi HCS di Grisseesheweg (sekarang Jl. Gresik) kemudian satu lagi HCS di pasar turi
5. Mendirikan MULO pada tahun 1916
6. Mendirikan KES (*Koningin Emma School*) sebuah sekolah kejuruan pada tahun 1912 di daerah Sawahan, Jl. Tentara Genie Pelajar.
7. Mendirikan sekolah tinggi kedokteran di Surabaya atau NIAS di Viaduct Straat No 47 (sekarang Jl. Kedungdoro No. 38 Surabaya) pada tahun 1913.<sup>48</sup>

#### ➤ **Jenis-jenis Sekolah di Surabaya**

Pada masa ini sektor pendidikan di Surabaya dan sekolah dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dasar ialah pendidikan rendah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, ada juga yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar, Kemudian jenjang selanjutnya setelah sekolah rendah adalah pendidikan lanjutan, pendidikan lanjutan di Surabaya ada dua jenis, yakni jenis pendidikan lanjutan yang bersifat umum dan bersifat kejuruan, selanjutnya setelah jenjang pendidikan lanjutan, di Surabaya pada masa ini juga memiliki sekolah dengan jenjang pendidikan Tinggi.

#### **1. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda**

Terdiri dari Sekolah Taman Kanak-Kanak (*Frobelschool*) ,Sekolah Rendah Eropa atau ELS (*Europeesche Lagere School*), Sekolah Bumiputra-Belanda atau HIS (*Hollandsch Inlandsche school*), Sekolah Cina-Belanda atau HCS (*Hollandsch Chineesche School*).

##### a. Sekolah Taman Kanak-kanak (*Frobelschool*)

Sekolah Taman Kanak-kanak di surabaya didirikan oleh perkumpulan Umat Kristiani yang mendapatkan subsidi dari pihak Kolonial Belanda. Di Surabaya ada dua macam sekolah taman kanak-kanak ini, pertama ialah sekolah yang didirikan oleh Nyonya Asian van Timor

<sup>48</sup>Sumanto, Wasty dan F X Suyarno. 1983.*Landasan Historis Pendidikan Indonesia*.Surabaya: Usaha Nasional. Hlm 37

yang sering dipanggil dengan tante Asia di Jl. Werfstraat (sekarang Jl. Penjara).<sup>49</sup>

b. ELS (*Europeesche Lagere School*)

ELS ini ialah sekolah bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Pada awalnya lama belajar di ELS adalah 3 tahun, kemudian pada tahun 1907 masa belajar di ELS diubah menjadi 7 tahun. Pelajaran yang diajarkan ialah menulis, membaca, berhitung, Bahasa Belanda, dan ilmu bumi. ELS baru bisa dibuka bila jumlah murid memenuhi 20 orang dipulau Jawa dan 15 orang untuk di luar Jawa.<sup>50</sup>

c. HIS (*Hollandsch Inlandsche School*)

HIS di Surabaya dibagi menjadi dua, yakni HIS negeri dan HIS bersubsidi, HIS negeri didirikan tahun 1914 dengan masa belajar 7 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bagi golongan pribumi, HIS merupakan jalan utama guna meningkatkan drajat sosial, karena sekolah ini yang pada awalnya hanya diperuntukkan oleh orang-orang elite saja berubah bisa dimasuki oleh anak-anak golongan rendah setelah adanya politik etis.<sup>51</sup> Di Surabaya HIS bersubsidi didirikan pada tahun 1916 di daerah Krembangan, sekolah ini terdiri dari 70 murid dan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh 5 orang guru.<sup>52</sup>

d. HCS (*Hollandsch Chineeshe School*)

Sekolah untuk anak-anak Cina pertama kali di Surabaya dibuka oleh perkumpulan *Ho Tjong Hak Kwan* di daerah Keputran pada tanggal 5 November 1903. Sekolah dasar ini menggunakan bahasa *Kuo Yu* (bahasa nasional Tiongkok) sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu juga terdapat sekolah rendah kelas satu HCS yang terbuka untuk anak-anak keturunan timur asing. Sekolah ini didirikan pada 1 Juli 1908 di Jalan Genteng dengan masa belajar selama 7 tahun dan hanya menampung 200 anak Tionghoa, dengan pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, ilmu hewan dan tumbuhan, sejarah negeri Belanda dan Hindia-Belanda, menyanyi dan menggambar.<sup>53</sup>

## 2. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Melayu

Pendidikan rendah dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu di Surabaya terdiri dari Sekolah Ongko Loro (*De scholen der tweede klasse*), Sekolah Desa (*Volksschool*) dan Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*).

a. Sekolah Ongko Loro

Sekolah Ongko Loro banyak didirikan di daerah distrik-distrik dan lama belajar di sekolah ini adalah 3 tahun tentu dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Sekolah rendah kelas dua disediakan untuk anak bumiputra golongan menengah. Kurikulum

sekolah rendah kelas dua sangat sederhana yakni membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah ini berfungsi untuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan tenaga kerja rendah untuk kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta.<sup>54</sup>

b. Sekolah Desa

Sekolah Desa (*Volkshool*) bermula ketika pada tahun 1907 sebuah lembaga yang bernama *Inlandsch Volsonderwijs* berdiri, lembaga ini bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang sederhana bagi penduduk desa. Lama belajar sekolah desa yaitu 3 tahun dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa melayu. Pengetahuan yang diajarkan ialah kepandaian membaca, menulis, bahasa melayu, menggambar dan berhitung. Sekolah ini bertujuan untuk memberantas buta huruf, selain itu menjadi penyebar buah pikiran dan pengetahuan bangsa Belanda, serta mendorong masyarakat agar menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Di Surabaya sekolah desa didirikan pada tahun 1914 di daerah Krembangan dengan 208 murid dan 6 guru<sup>55</sup>

c. Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*)

Sekolah lanjutan didirikan untuk kelanjutan dari sekolah desa, sekolah ini mulai dibuka pada tahun 1916. Lama belajar di sekolah ini ialah 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik dari sekolah desa. Sekolah lanjutan ini setara dengan kelas 4 dan 5 di sekolah rendah kelas dua, sehingga sekolah ini didirikan ditengah-tengah lingkungan sekolah desa. Sekolah ini sangat jarang peminatnya, sebagian dari sekolah ini khusus disediakan bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran membuat kerajinan rumah tangga. Sekolah ini didirikan di Genuaweg (sekarang Jl. Nilam Timur), memiliki 179 murid dan 4 guru.<sup>56</sup>

## 3. Pendidikan lanjutan (*Middelbare Ondersijs*) Umum

Pendidikan lanjutan (*Middelbare Ondersijs*) umum dengan sekolahnya yakni MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan HBS (*Hoogere Bugar School*)

a. MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)

Berdasarkan sistem sekolah kolonial, MULO merupakan kategori sekolah dasar yang diperluas. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, sehingga MULO dapat dimasukkan dalam jenjang pendidikan lanjutan. MULO pertama kali didirikan pada tahun 1916, sekolah ini sekarang menjadi SMP 3 dan 4 praban, yang terdiri dari 198 murid dan 4 guru.<sup>57</sup>

b. HBS (*Hoogere Bugar School*)

Di Surabaya HBS pertama kali didirikan pada tahun 1875 yang berada di Institut Buys terletak di sudut jalan Baliwerti dan alun-alun Cottong, sekarang gedung itu ditempati ITS Surabaya yaitu jalan Cokroaminoto.

<sup>49</sup> G. H. Von Vaber, *Neuw Soerabaia*, (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933), Hlm 252

<sup>50</sup> Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara. Hlm 97

<sup>51</sup> Ibid. Hlm 115

<sup>52</sup> G. H. Von Vaber, 1931. *Op. Cit. Hlm 254*

<sup>53</sup> Aan, Ong Hing. 1903. *Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 THHK Surabaya*. Surabaya: THHK Surabaya. Hlm 12

<sup>54</sup> Ibid. Hlm 62

<sup>55</sup> Sumanto, Wasty dan F X Suyarno. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm 66

<sup>56</sup> Ibid. Hlm 41

<sup>57</sup> BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Onderwijs in Nederlandsh-Indie, 1916*, hlm. 20-23

#### 4. Pendidikan lanjutan (*Middelbare Ondersijs*) Kejuruan

##### a. Pendidikan Kejuruan

Sekolah teknik pertukangan (*Ambachtschool*) di Surabaya didirikan pada tahun 1905, sekolah ini menyediakan tenaga kerja pertukangan dan pengerajin yang sangat dibutuhkan oleh pihak kolonial Belanda. Sekolah ini bernama KES (*Koningin Emma School*), dengan lama belajarnya ialah 5 tahun. Terdapat dua jurusan yakni jurusan bangunan gedung dan jurusan bangunan air. Sekolah ini menerima lulusan dari HIS dan HCS.<sup>58</sup>

#### 5. Pendidikan Tinggi

##### a. NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*)

NIAS atau sekolah dokter Hindia Belanda di Surabaya didirikan pada tanggal 1 Juli 1914. Tujuan dari didirikannya sekolah ini ialah untuk mendidik dokter-dokter yang langsung bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat.<sup>59</sup>

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

Surabaya pada awal abad ke dua puluh merupakan kota dengan pelabuhan yang sangat maju bahkan melebihi pelabuhan-pelabuhan lainnya di Jawa, dengan majunya pelabuhan Surabaya maka migrasi tak dapat terhindarkan, banyak warga Eropa yang mulai menetap di Surabaya baik itu sebagai pekerja pemerintah Kolonial maupun membuka perusahaan Industri di Surabaya, hal ini yang menyebabkan Surabaya banyak diperhatikan oleh pihak Kolonial Belanda selama masa politik Etis ini, karena banyaknya warga Eropa tentu mereka juga butuh sekolah-sekolah untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka, selain faktor tersebut juga majunya perindustrian di Surabaya menjadi salah satu faktor penting berkembangnya pendidikan, karena pemerintah juga memerlukan tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri-industri mereka maupun swasta, karena sektor industri juga di dominasi oleh orang-orang Eropa. Di lain sisi juga tentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pelabuhan yang menjadi pemicu gerak utama ekonomi di Surabaya

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat akibat dari ramainya aktivitas pelabuhan dan industri di Surabaya merupakan faktor penting dari diperhatikannya Surabaya pada masa politik etis, karena perkembangan Ekonomi tadi mampu menarik masyarakat dari golongan pribumi Cina Arab bahkan Eropa untuk mendekat dan menetap di Surabaya. Hal ini yang secara tidak langsung juga membuat pihak pemerintah Hindia-Belanda memperhatikan pula sektor pendidikan di Surabaya, karena Surabaya sudah menjadi salah satu kota penting layaknya Batavia sebagai pusat pemerintahan. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang juga semakin tinggi tiap tahunnya. Jadi dapat kita simpulkan faktor-faktor diatas adalah yang membuat pihak Kolonial Hindia-Belanda menjadikan Surabaya sebagai salah satu fokus utama penerapan daro Politik Etis di Hindia-Belanda

Di Surabaya penerapan sistem Irigasi pada masa politik etis ini ialah saluran irigasi terbagi menjadi beberapa kategori, antara saluran primer, sekunder, tersier dan kwarter. Secara umum pembangunan saluran primer dan sekunder, sebagai saluran besar dibangun melalui kerja wajib dengan biaya ditanggung dengan pemerintah. Untuk saluran tersier oleh desa atau beberapa desa yang berkepentingan, sedangkan saluran kwater dibuat oleh masing-masing pemilik sawah yang akan menggunakan saluran tersebut. Saluran primer adalah saluran pertama yang menghubungkan langsung dengan sungai atau sumber lain yang diambil airnya untuk pengairan

Dalam bidang pendidikan terdapat perkembangan seperti ELS yang mengalami peningkatan masa studi yang awalnya hanya 3 tahun menjadi 7 tahun. Selain itu dalam kurikulum ELS juga ditambah dan menekankan Bahasa Belanda, karena pelajaran akan pemahaman Bahasa Belanda dianggap sangat penting. Dan juga selain itu terdapat sekolah bersubsidi yang didirikan oleh perkumpulan missionaris gereja yaitu Broederschool Santo Yosef dan ELS Broederschool Santo Yosef. Pendidikan untuk etnis Cina pertama kali didirikan oleh perkumpulan Hok Tjiong Hak Kwan yang mendirikan sekolah bernama THHK (Tiong Hwa Hwee Kwan). Pada tahun 1909 pihak Kolonial mendirikan sekolah HCS untuk anak-anak Cina, dan kemudian pada tahun 1913 jumlah HCS bertambah setelah pihak Kolonial mendirikan da HCS lagi, pertama di Grisseescheweg (sekarang Jl. Gresik) jumlah siswa 200, dan yang kedua di Pasar Turi dengan jumlah siswa 209.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip

##### Arsip

- ANRI. *Staatsblad Van Nederlandsch Indie. No. 110. 1858 – 1930.*
- BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Inlandsch Onderwijs 1910*
- BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Inlandsch Onderwijs 1911*
- BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Inlandsch Onderwijs 1912*
- BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Inlandsch Onderwijs 1913.*
- BPK Jawa Timur. *Staatsblad, No. 7893*
- BPK Jawa Timur. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie no 266 1901*
- BPK Jawa Timur. *Jaarlijksch Verslag Schooljaar 1910-1911*
- BPK Jawa Timur. *Verslag Opleidingsscholen Van Het Nederlandsch-Indie 1910*
- BPK Jawa Timur. *Jaarlijksch Verslag School Tot Opleiding Van INL. Artsen 1912-1913*
- BPK Jawa Timur. *Jaarlijksch Verslag School Tot Opleiding Van INL. Artsen 1913-1914*
- BPK Jawa Timur. *Jaarlijksch Verslag School Tot Opleiding Van INL. Artsen 1914-1915*
- BPK Jawa Timur. *Jaarlijksch Verslag School Tot Opleiding Van INL. Artsen 1915-1916*

<sup>58</sup> Nasution. 1983. *Op. Cit. Hlm145*

<sup>59</sup> BPK Jawa Timur. *Algemeen Verslag Van Het Onderwijs in Nederlandsch Indie, 1916:112*

**Buku – Buku**

- Aan, Ong Hing. 1903. *Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 THHK Surabaya*. Surabaya: THHK Surabaya
- Aminudin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Denys Lombard, 2005, *Nusa Jawa Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*, Jakarta, Gramedia,
- D.H. Burger, 1983, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Bharata Karya Aksara,
- Djumhur, I dan H Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Erman Mawardi, Prof. R. Drs, Dipl. AIT. 2007. *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*. Bandung : Alfabeta.
- G. H. Von Vaber, *Neuw Soerabaia, (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1933)*,
- Handinoto, 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1987-1940)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen PETRA Surabaya.
- M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta. Serambi Ilmu Semesta
- Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara
- Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Pusaka Intelektual
- Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu Press
- Setiawan, Nugraha. 2009. Sejarah Transmigrasi. Online diakses di <http://nugraha.-suarakita.com/2009/sejarah-tranmigrasi/> pada tanggal 24 Maret 2017.
- Sumanto, Wasty dan F X Suyarno. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi UNESA. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi (Progam Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Negeri Surabaya*. Surabaya
- W. F. Werheim, 1999, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Tiara Waana